



BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2344-2359

DOI: <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1298>

Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Yeyen¹, Kartika Rachma Sari², Choiruddin³

^{1,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

• Corresponding author

yeyenirwann@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera selatan yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota dimulai dari Periode Anggaran 2018 sampai 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan (www.BPK.go.id). Penelitian ini dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan Software Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja Keuangan Daerah.

Kata Kunci: *Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan*

Abstract

This study aims to determine the effect of the Regional Independence Ratio, the Effectiveness of Regional Original Income, and Regional Expenditure Management on Regional Financial Performance in Regency/City Governments in South Sumatra Province. The population used in this study were all Regencies and Cities in South Sumatra Province consisting of 13 Regencies and 4 Cities starting from the 2018 to 2023 Budget Period. This study is a quantitative study using secondary data obtained from the official website of the Audit Board of Indonesia (www.BPK.go.id). This study was analyzed by multiple linear regression using Eviews 12 Software. The results of this study indicate that the Regional Independence Ratio, the Effectiveness of Regional Original Income, and Regional Expenditure Management have an effect on Regional Financial Performance.

Keywords: Regional Independence Ratio, Effectiveness of Regional Original Income, Regional Expenditure Management, Financial Performance

PENDAHULUAN

Dengan bergesernya sistem pemerintahan dari era Orde Baru menuju era Reformasi, lahirlah peluang untuk pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan peralihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk melimpahkan beban pembiayaan dari pusat ke daerah, tetapi lebih jauh mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan serta pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diharapkan, keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Otonomi juga diharapkan mampu menurunkan ketergantungan terhadap dana dari pusat melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Mahmudi (2019), pelaksanaan otonomi daerah yang berhasil setidaknya ditandai oleh dua hal penting: pertama, daerah harus memiliki kemampuan keuangan yang baik, yakni dengan kewenangan penuh dalam menggali dan mengelola sumber-sumber

pendapatan daerah sendiri untuk membiayai pemerintahannya; kedua, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat harus diminimalkan, sehingga PAD menjadi sumber pembiayaan utama dan memperkuat peran strategis pemerintah daerah. Dalam konteks ini, independensi fiskal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian daerah.

Kinerja keuangan menjadi salah satu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Hutabarat (2021:2) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah bentuk analisis untuk menilai sejauh mana suatu instansi menjalankan pengelolaan keuangannya berdasarkan aturan yang berlaku secara baik dan benar. Keberhasilan pemerintah daerah dalam otonomi juga dapat tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah secara konsisten dari waktu ke waktu.

Untuk menilai kemampuan keuangan daerah, digunakan berbagai rasio keuangan. Mahmudi (2019) menyebut beberapa rasio utama dalam pengukuran tersebut, seperti Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan, dan Rasio Efektivitas pengelolaan PAD. Rasio-rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Selain itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah serta efisiensi dalam pengelolaan belanja juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja fiskal daerah secara menyeluruh. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Anggaran Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2018 sampai 2023 adalah sebagai berikut dalam tabel 1.1 sampai dengan tabel 1.2.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
2018	3.528.010.712.184	5.741.435.384.299
2019	3.494.510.853.251	6.381.903.769.000
2020	3.375.100.984.842	5.875.869.342.538
2021	3.865.463.033.085	6.009.694.627.380
2022	3.930.955.849.520	5.090.093.999.526
2023	5.199.841.748.586	4.667.616.469.087

Sumber: Data BPK diolah, 2024

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	5.730.234.643.508	6.763.760.533.371	91,21
2019	7.074.829.839.229	6.422.760.771.550	90,78
2020	7.901.928.827.814	6.900.375.143.744	87,33
2021	11.410.177.341.872	10.060.730.260.979	88,17
2022	10.426.397.636.784	9.663.575.726.750	92,68
2023	9.653.373.230.507	11.207.592.376.605	91,50

Sumber: Data BPK diolah, 2024

Data dari BPK RI menunjukkan bahwa selama periode 2018 hingga 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi, dan belanja daerah juga tidak stabil, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 92,68 persen. Meskipun demikian, penerimaan dari pendapatan transfer, terutama dari pemerintah pusat, masih jauh lebih besar dibandingkan PAD, menandakan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat. Pernyataan ini diperkuat oleh Lydia K. Christyana, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, yang menjelaskan bahwa pada Januari 2023, realisasi pendapatan daerah memang lebih tinggi dari belanja, namun dana transfer pusat tetap menjadi penopang utama pendanaan daerah.

Penelitian Harsono (2023) menunjukkan bahwa PAD, belanja modal, dan upah minimum daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan upah minimum juga berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan belanja modal justru memiliki dampak negatif terhadapnya. Di sisi lain, PAD tidak memengaruhi pengangguran, namun belanja daerah dan upah minimum terbukti menaikkan tingkat pengangguran.

Sementara itu, Wahono (2018) menemukan bahwa tidak semua komponen PAD berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan, namun retribusi daerah dan sumber pendapatan sah lainnya terbukti berpengaruh positif. Keseluruhan temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD untuk mendukung otonomi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019:16), metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen yang telah disiapkan. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara statistik atau kuantitatif dengan tujuan utama menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Proses penelitian berlangsung sejak Februari hingga Juni 2024, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan selama periode tahun 2018 hingga 2023.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data panel. Seperti dijelaskan oleh Widarjono (2018), data panel merupakan gabungan antara data cross section (data dari beberapa objek pada waktu yang sama) dan data time series (data yang diamati selama periode tertentu). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika perubahan dari masing-masing entitas secara lebih mendalam. Untuk keperluan pengolahan data, digunakan perangkat lunak statistik Eviews versi 12.

Adapun untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini, digunakan metode analisis regresi linear berganda. Regresi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Model regresi dalam analisis panel memanfaatkan kombinasi antara data waktu (time series) dan unit amatan (cross section), sehingga model dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Dalam model tersebut, Y merupakan variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah, sedangkan X_1 menunjukkan rasio kemandirian daerah, X_2 menggambarkan efektivitas pendapatan asli daerah, dan X_3 menunjukkan pengelolaan belanja daerah. Simbol α adalah konstanta, β_1 , β_2 , dan β_3 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen, sementara e adalah error term atau residual. Notasi i merepresentasikan unit cross section dan t adalah waktu pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	15.07824	95.49569	98.11304	64.00569
Median	9.695000	90.85000	100.6200	30.51000
Maximum	107.6100	617.6000	939.6200	757.6500
Minimum	2.900000	7.460000	1.050000	1.180000
Std. Dev.	20.22257	58.89050	93.93935	93.88811
Skewness	2.925863	6.930592	6.987079	4.513232
Kurtosis	11.28229	62.01558	64.57230	31.15144
Jarque-Bera	437.0657	15618.65	16942.31	3714.417
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1639.980	9740.560	10007.53	6528.580
Sum Sq. Dev.	41304.18	350384.3	891284.8	890312.6
Observations	102	102	102	102

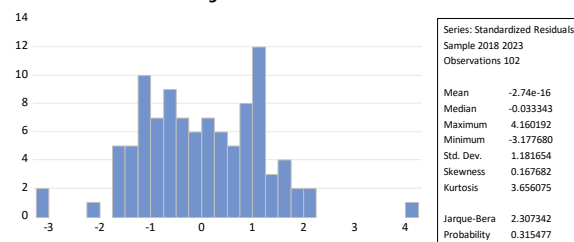
Sumber: Output Eviews, 2024

Berdasarkan Tabel 1 hasil Statistik deskriptif dapat diketahui bahwa:

1. Rasio kemandirian daerah menunjukkan jika nilai minimum adalah 2,90 dan nilai maksimum 107,61 dengan nilai mean sebesar 16,07 dan standar deviasi sebesar 20,22. Nilai minimum terjadi pada kabupaten Empat Lawang ditahun 2021
2. Efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 7,46 dan nilai maksimum sebesar 617,62 dengan nilai mean sebesar 95,49 dan nilai standar deviasi sebesar 58,89. Nilai minimum terjadi pada kabupaten Lahat ditahun 2018
3. Pengelolaan belanja daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 939,62 dengan nilai mean sebesar 98,11 dan standar deviasi sebesar 93,93. Nilai minimum terjadi di kabupaten Empat Lawang ditahun 2021
4. kinerja keuangan daerah menunjukkan nilai minimum sebesar 1,18 dan nilai maksimum 757,65 dengan nilai mean sebesar 64,00 dan standar deviasi sebesar 93,88. Nilai minimum terjadi pada Musi Rawas

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai probability Jarque-Bera sebesar 0,084929 yang berarti lebih besar dari α ($0.315477 > 0,05$), hasil ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal atau dapat disebut telah lulus dari uji normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

a	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.400622	-0.165889
X2	0.400622	1.000000	-0.049587
X3	-0.165889	-0.049587	1.000000

Sumber: output eviws, 2024

Berdasarkan hasil tabel 2 koefisien korelasi X1 dan x2 sebesar $0.400622 < 0,85$. X1 dan X3 sebesar $-0.165889 < 0,85$ dan X2 dan X3 sebesar $-0.049587 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/08/24 Time: 03:26
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 102

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.61313	20.87806	2.951095	0.0040
X3	0.041156	0.100758	0.408460	0.6838
X2	-0.168554	0.172961	-0.974522	0.3322
X1	0.898780	0.510208	1.761596	0.0813

R-squared 0.031739 Mean dependent var 64.00569
 Adjusted R-squared 0.002098 S.D. dependent var 93.88811
 S.E. of regression 93.78957 Akaike info criterion 11.95841
 Sum squared resid 862055.3 Schwarz criterion 12.06135
 Log likelihood -605.8789 Hannan-Quinn criter. 12.00009
 F-statistic 1.070779 Durbin-Watson stat 1.447984
 Prob(F-statistic) 0.365157

Sumber: Output Eviews, 2024

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa nilai signifikansi variabel bebas berada diatas 0,05. Dengan Nilai Probabilitas X1 sebesar $0,0813 > 0,05$, nilai Probabilitas X2 sebesar $0,3322$ dan nilai probabilitas X3 sebesar $0,6838$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 1,080403 + (-0,0261461) X1 + 0,0519632 X2 + 0,0419822 X3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,080403, artinya apabila variabel rasio kemandirian keuangan daerah(X1), efektivitas pendapatan asli daerah(X2), dan pengelolaan belanja daerah(X3) bernilai konstan atau 0, maka besarnya kinerja keuangan(Y) sebesar 1,08%
2. Nilai koefisien rasio kemandirian keuangan daerah(X1) memiliki pengaruh negatif (berlawanan arah) terhadap kinerja keuangan(Y) sebesar -0,0261461. Hal ini menunjukkan bahwa jika rasio kemandirian meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kinerja keuangan menurun sebesar 0,026%. Sebaliknya jika rasio kemandirian menurun sebesar 1% maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,26%.
3. Nilai koefisien efektivitas pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif (searah) terhadap kinerja keuangan sebesar 0,0519632. Hal ini menunjukkan bahwa jika efektivitas pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kinerja keuangan meningkat sebesar 1%. Sebaliknya jika efektivitas pendapatan asli daerah menurun sebesar 1% maka kinerja keuangan akan menurun sebesar 1%.
4. Nilai koefisien pengelolaan belanja daerah memiliki pengaruh positif (searah) sebesar 0,0419822. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengelolaan belanja daerah meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kinerja keuangan meningkat sebesar 1%. Sebaliknya jika pengelolaan belanja daerah menurun sebesar 1% maka kinerja keuangan akan menurun sebesar 1%.

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
			-	
C	-1.080403	1.120750	0.964000	0.3376
LOG_X1	-0.261461	0.131434	-1.989305	0.0497
LOG_X2	0.519632	0.249394	2.083580	0.0400
LOG_X3	0.419822	0.063847	6.575430	0.0000
Weighted Statistics				

	0.415562	Mean dependent	
R-squared	var		2.926034
Adjusted R-squared	0.396295	S.D. dependent	2.161337
	var		
S.E. of regression	1.452991	Sum squared resid	192.1178
F-statistic	21.56838	Durbin-Watson stat	1.729673
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: output eviews, 2024

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel maka hipotesis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Dari analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar $-1,989305$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,0497 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja keuangan daerah. Dari analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar $2,083580$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,0400 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Pengaruh Pengolaan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Dari analisis tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar $6,575430$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.415562	Mean dependent var	2.926034
Adjusted R-squared	0.396295	S.D. dependent var	2.161337
S.E. of regression	1.452991	Sum squared resid	192.1178
F-statistic	21.56838	Durbin-Watson stat	1.729673
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: output eviews, 2024

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan hasil penghitungan regresi dengan nilai F hitung sebesar 21,56838 dengan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$. Sedangkan nilai F tabel sebesar 2,72. Maka dari itu nilai F-hitung $>$ F-tabel ($21,56838 > 2,72$) yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H4) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar -1,989305 yang lebih kecil dari t tabel -1,66388 serta tingkat signifikansi sebesar 0,0497 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu terdapat pengaruh antara rasio kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dessy Ari Permatasari (2022) yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dengan nilai t hitung sebesar 3,40, signifikansi 0,01 ($< 0,05$), dan koefisien sebesar 2,25. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian ini juga mencerminkan sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi pun meningkat, yang pada akhirnya mendorong tingkat kemandirian daerah. Secara keseluruhan, rata-rata rasio kemandirian sebesar 20,24% dinilai cukup optimal, sehingga dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2,083580 yang lebih besar dari t tabel 1,66388 serta nilai signifikansi sebesar 0,0400 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima, artinya efektivitas PAD memang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini menegaskan bahwa semakin efektif pengelolaan PAD, maka kinerja keuangan daerah juga akan meningkat. Efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana realisasi penerimaan PAD mampu mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Namun demikian, hasil ini juga mengindikasikan bahwa meskipun perolehan PAD menunjukkan tren optimal, kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah masih dinilai belum maksimal. Upaya peningkatan efektivitas PAD masih diperlukan agar kinerja keuangan dapat terus membaik.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gradiana Mei Taek (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitiannya, Taek menjelaskan bahwa tingginya efektivitas PAD mendukung alokasi dana untuk belanja modal, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana daerah. Peningkatan pembangunan ini akan mempercepat pertumbuhan dan memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 6,575430 yang lebih besar dari t tabel 1,66388, serta tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. Artinya, pengelolaan belanja daerah berpengaruh nyata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika belanja daerah dikelola secara efisien dan terkendali, maka pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Pengelolaan belanja yang baik ditunjukkan dari upaya pemerintah dalam menekan realisasi belanja agar tidak melebihi total pendapatan daerah. Efisiensi dalam pengeluaran ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program pembangunan tanpa membebani anggaran secara berlebihan, sehingga berdampak

positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Maulana Ramadhan (2022) yang juga menemukan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam penelitiannya, Maulana menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengelolaan belanja sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 2,375 lebih besar dari t tabel 1,656. Oleh karena itu, hipotesis serupa (H3) juga diterima dalam penelitiannya. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas dalam alokasi serta realisasi belanja merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Rasio Kemandirian keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai F hitung sebesar 21,56838 dengan signifikansi 0,000000 lebih besar dari F tabel 2,72, sehingga variabel rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Sumatera Selatan. Hipotesis keempat (H4) diterima.

Penelitian ini mendukung hasil Dessy Ary Permatasari (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan pengelolaan belanja daerah secara bersama-sama memengaruhi kinerja keuangan daerah. Semakin mandiri daerah dalam mengelola keuangannya, semakin baik kinerja keuangannya, yang berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Sampel penelitian adalah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian untuk variabel rasio kemandirian daerah (X1) diperoleh kesimpulan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) Hasil penelitian untuk variabel efektivitas pendapatan asli daerah (X2) kesimpulan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh Terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (3) Hasil penelitian untuk variabel pengelolaan belanja daerah (X3) diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah (4) Hasil penelitian untuk variabel rasio kemandirian keuangan daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis mengemukakan saran yaitu Bagi pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hendaknya terus selalu mengoptimalkan kebijakan otonomi daerah terutama pada sektor pendapatan daerah. Penggalan sumber-sumber daerah memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini. N & Hidayat. T (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. *Profit:Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol.2 No.2
- Atmaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A., (2017). Pengaruh Kekayaan daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol 03 no 02.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal: Transformasi Administrasi*, 11(2), 164-174
- Azzahro. Afifah. N (2023). Pengaruh rasio kemandirian daerah dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh* vol.2 No.4
- Bagus Handoko (2020) . Analisis Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera utara. Vol. 10 No. 1, hal 1-14
- BPKAD Sumatera Selatan. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan. <http://bpkad.sumselprov.go.id/>. (diakses 14 April 2024)
- Budiana, R., & Rahayu, S., (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah

Provinsi di Indonesia Tahun 2020). Jurnal: The E Proceeding Of Management, vol. 8 no.6, hal 1-8

Dian nofriana Batubara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Jurnal: Buletin Ekonomi Vol. 11, hal 1-86.

Fitri Rahmadhani (2022). Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Bajang Journal: vol 2 no 5. Hal 1-16

Francis Hutabarat (2021). Analisis Kinerja Keuangan (Gita Puspitasari). Desenta Muliavisitama, Banten Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Goenawan, Herry. S (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2014. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 11(1), 74-91, ISSN:2087-2054.

Gradiana Mei (2019). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2012 2017. <https://eprints.unpak.ac.id>. Halaman 52-54

Halim, A (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta

Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal Of Economics And Business, 4(1), 34.

Harsono. I & Rauhul. I (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ganec Swara vol.18 No.1, hal 1-10

Kamaroellah, R. A (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam. Vol 14 No 1. Hal 130-131

Mahmudi (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Yogyakarta: Erlangga

Mardiasmo (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta

Maulana Ramadhan (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Syntax Transformation Vol. 02 No. 06. Hal 1-15

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019.

- Permatasari Ari. D(2022). Pengaruh Kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Vol 22, no.3. Hal 1-10
- Pratama Hakiki. D (2021). Pengaruh rasio kemandirian Daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sekadau provinsi Kalimantan Barat. Ejournal.ipdn.ac.id. halaman 20-23
- Pratama, A.H. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang. Halaman 1-25
- Putri, R. S., Fermansyah, D., Eliza, A., & Suharto, S. (2021). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol 7(1), hal 60 -72.
- Putu, N., Sukma, G., & Bagus, I., (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah: E-Journal Manajemen, Vol. 4 No. 2.
- Rizky Amelia (2021). Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 8 No.1, hal 114-115
- Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(23), hal 1-21.
- Saraswati, D. & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal: Akuntansi Bisnis & Publik, 9(2) hal 110-120
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. JEA: Jurnal Ekspolari Akuntansi, halaman 1-11.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 -2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September, halaman 408-425
- Sari, N. M. D., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana. Vol 8 No 8.
- Sugiyono (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Surachman & Handayani, N.S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

dan Kota di Kalimantan Timur.

Sari Kartika (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangann pemerintah daerah di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vo. 20 No. 02. Hal 2

Tangkilisan (2007). Manajemen Publik, Jakarta:Grasindo

Trisnaningsih Sri (2022). Pengaruh Kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol 22(3). Hal 1-10

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wahono. (2018). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera. [Http://digilib.unila.ac.id/eprint/30605](http://digilib.unila.ac.id/eprint/30605). Hal 63-65.

Welly. & L. Djuniar (2017). Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan APBD tahun 2009-2015. Jurnal Ekonomi: Universitas Muhammadiyah. Palembang vol 22(1) hal 1-21

Widarjono, A. (2018). EKONOMETRIKA. Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. Halaman 1-9